

Dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap Pengangguran, Iklim Investasi, dan Pendapatan Nasional

Ceysea Febry Permata¹, Hendra Riofita²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: ceyseaf@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.6598>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 18 Juni 2026

Revised: 27 Juni 2026

Accepted: 15 Juli 2026

Kata Kunci

Makan Bergizi Gratis (MBG);
Pengangguran; Iklim Investasi;
Pendapatan Nasional

Keywords

Free Nutritious Meals
(MBG); Unemployment;
Investment Climate; National
Income



ABSTRACT

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran 2024-2029 dengan anggaran Rp 71 triliun per tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kualitatif dampak program MBG terhadap tiga variabel ekonomi makro yaitu pengangguran, iklim investasi, dan pendapatan nasional. Metode yang digunakan adalah studi literatur kualitatif dengan pendekatan analisis isi terhadap 25 dokumen yang terdiri dari artikel jurnal, laporan lembaga internasional (World Bank, IMF, ADB, ILO), dan dokumen kebijakan nasional periode 2015-2025. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, program MBG berpotensi menyerap 1,5 hingga 2,5 juta tenaga kerja baru melalui tiga jalur yaitu sektor pertanian (petani, peternak), sektor pengolahan dan distribusi (dapur sekolah, logistik), serta sektor jasa pendukung. Kedua, respons investor terhadap program MBG bersifat sektoral; investor di sektor agribisnis, pangan, dan logistik merespon positif, sementara investor di sektor properti dan manufaktur padat karya cenderung wait and see akibat potensi kenaikan suku bunga. Ketiga, program MBG berpotensi meningkatkan pendapatan nasional melalui jalur konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja jangka panjang, dan efek multiplier dari belanja pemerintah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan program MBG dalam mencapai ketiga dampak positif tersebut sangat bergantung pada tata kelola yang baik, keterlibatan UMKM dan petani lokal, serta skema pendanaan yang tidak mengganggu stabilitas fiskal.

The Free Nutritious Meal Program (Program Makan Bergizi Gratis/MBG) is a flagship policy of the 2024-2029 Prabowo-Gibran administration with an annual budget of IDR 71 trillion. This study aims to qualitatively analyze the impact of the MBG program on three macroeconomic variables: unemployment, investment climate, and national income. The method used is a qualitative literature study with a content analysis approach of 25 documents consisting of journal articles, reports from international institutions (World Bank, IMF, ADB, ILO), and national policy documents from the 2015-2025 period. The results show three main findings. First, the MBG program has the potential to absorb 1.5 to 2.5 million new workers through three channels: the agricultural sector (farmers, ranchers), the processing and distribution sector (school kitchens, logistics), and the supporting services sector. Second, investor responses to the MBG program are sectoral; investors in agribusiness, food, and logistics sectors responded positively, while investors in property and labor-intensive manufacturing sectors tend to wait and see due to potential interest rate increases. Third, the MBG program has the potential to increase national income through consumption channels, long-term labor productivity improvements, and the multiplier effect of government spending. This study concludes that the success of the MBG program in achieving these three positive impacts depends heavily on good governance, the involvement of MSMEs and local farmers, and a funding scheme that does not disrupt fiscal stability.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite Ceysea Febry Permata el at (2026) Dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap Pengangguran, Iklim Investasi, dan Pendapatan Nasional <https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.6598>

PENDAHULUAN

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang resmi bekerja pada Oktober 2024 mengusung salah satu program unggulan yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dirancang untuk menjangkau sekitar 82,9 juta penerima yang terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, dan balita dengan anggaran mencapai Rp 71 triliun per tahun (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024, p.45). Besarnya alokasi anggaran ini menjadikan MBG sebagai program intervensi fiskal terbesar dalam sejarah kebijakan sosial di Indonesia.

Namun, di balik tujuan mulia peningkatan gizi masyarakat, program MBG memiliki implikasi ekonomi yang luas dan kompleks. Setidaknya ada tiga variabel ekonomi makro yang akan terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari program ini: pengangguran, iklim investasi, dan pendapatan nasional.

Pertama, soal pengangguran. Indonesia masih bergulat dengan masalah ketenagakerjaan. Data Badan Pusat Statistik (2025, p.5) menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari 2025 mencapai 5,2%, setara dengan sekitar 7,2 juta orang. Program MBG yang membutuhkan rantai pasok panjang dari hulu ke hilir berpotensi menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Mulai dari petani yang menanam bahan pangan, peternak yang memproduksi protein hewani, pekerja di dapur sekolah yang mengolah makanan, hingga tenaga logistik yang mendistribusikan. Pertanyaan yang perlu dijawab adalah: seberapa besar potensi penyerapan tenaga kerja ini dan bagaimana mekanismenya?

Kedua, soal iklim investasi. Program MBG akan mengubah struktur permintaan agregat secara signifikan. Pemerintah akan membelanjakan Rp 71 triliun per tahun untuk membeli makanan, jasa distribusi, dan operasional dapur sekolah. Ini adalah pasar baru yang besar dan stabil. Namun, di sisi lain, skema pembiayaan program ini menimbulkan kekhawatiran. Jika pemerintah memilih untuk membiayai MBG melalui utang, maka suku bunga berpotensi naik. Kenaikan suku bunga akan mengganggu sektor-sektor yang sensitif terhadap biaya pinjaman seperti properti dan manufaktur padat karya. Investor pun akan bereaksi. Ada yang melihat peluang, ada pula yang memilih wait and see.

Ketiga, soal pendapatan nasional. Dari perspektif ekonomi Keynesian, peningkatan belanja pemerintah akan mendorong pendapatan nasional melalui efek multiplier (Keynes, 1936, p.117). Uang yang dibelanjakan untuk MBG akan mengalir ke petani, pengusaha makanan, dan pekerja logistik. Mereka kemudian membelanjakan pendapatan mereka untuk kebutuhan lain, menciptakan putaran ekonomi baru. Namun, ada juga risiko crowding out ala Friedman (1968, p.15), yaitu investasi swasta yang tergusur akibat kenaikan suku bunga. Mana yang lebih dominan? Ini tergantung pada desain dan tata kelola program.

Sayangnya, diskusi publik dan literatur ilmiah selama ini lebih banyak berfokus pada aspek sosial dan gizi dari program MBG. Studi yang secara komprehensif menganalisis dampak program ini terhadap ketiga variabel ekonomi makro secara bersamaan masih sangat terbatas, terutama untuk konteks Indonesia. Padahal, pemahaman yang holistik sangat diperlukan agar program MBG tidak hanya berhasil secara sosial tetapi juga secara ekonomi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengajukan tiga pertanyaan utama:

1. Bagaimana potensi Program MBG dalam menyerap pengangguran dan menciptakan lapangan kerja baru di Indonesia?
2. Bagaimana respons investor terhadap Program MBG dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya?
3. Bagaimana mekanisme Program MBG mempengaruhi pendapatan nasional serta apa saja risiko dan peluangnya?

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis kualitatif yang mendalam tentang dampak program MBG terhadap ketiga variabel tersebut dengan mensintesis bukti-bukti dari berbagai literatur dan pengalaman negara lain. Kegunaan penelitian ini bersifat teoretis, yaitu memperkaya literatur ekonomi publik tentang kebijakan transfer in-kind, dan praktis, yaitu sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mendesain implementasi MBG agar memberikan manfaat ekonomi yang maksimal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali makna, interpretasi, dan pemahaman mendalam dari berbagai teks dan dokumen tanpa harus melakukan perhitungan statistik (Creswell, 2014, p.8). Studi literatur dipilih karena topik penelitian ini masih baru dan dinamis, sehingga sumber data terbaik saat ini berasal dari dokumen-dokumen tertulis.

Penelitian dilaksanakan pada periode Maret hingga April 2026. Lokasi penelitian bersifat virtual, meliputi akses ke basis data elektronik dari perpustakaan Universitas Negeri Jakarta dan perpustakaan digital lainnya.

Sumber data dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen tertulis yang relevan, terdiri dari:

1. Artikel jurnal ilmiah peer-review yang terbit pada periode 2015-2025.
2. Laporan lembaga internasional (World Bank, International Monetary Fund, Asian Development Bank, International Labour Organization).
3. Dokumen kebijakan resmi dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Badan Pusat Statistik.
4. Laporan pasar dan analisis ekonomi dari lembaga terpercaya (Bloomberg, ADB).

Kriteria inklusi meliputi: (a) dokumen membahas program makan bergizi gratis atau school feeding program, (b) dokumen membahas salah satu dari tiga variabel penelitian (pengangguran, investasi, pendapatan nasional), (c) dokumen diterbitkan dalam 10 tahun terakhir (2015-2025), (d) dokumen berbahasa Indonesia atau Inggris, (e) dokumen tersedia dalam teks lengkap. Kriteria eksklusi meliputi: (a) artikel opini atau editorial tanpa data empiris, (b) dokumen yang hanya fokus pada aspek gizi tanpa menyentuh aspek ekonomi, (c) studi yang bersifat teknis medis.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran literatur menggunakan kata kunci yang telah ditentukan. Kata kunci yang digunakan antara lain: "Makan Bergizi Gratis", "school feeding program", "unemployment", "labor absorption", "investment climate", "investor response", "national income", "multiplier effect", "fiscal policy", dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Basis data yang digunakan meliputi Google Scholar, Scopus, DOAJ, World Bank Open Knowledge Repository, ADB Publications, dan ILO Publications.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dan sintesis naratif (narrative synthesis). Langkah-langkah analisis adalah sebagai berikut:

1. Membaca seluruh dokumen secara berulang-ulang untuk memahami konteks dan argumen utama.
2. Memberi kode (coding) pada bagian-bagian yang relevan dengan ketiga variabel penelitian.
3. Mengelompokkan kode-kode tersebut ke dalam tema-tema besar.
4. Melakukan sintesis naratif dengan menghubungkan temuan antar dokumen.
5. Menarik kesimpulan dan implikasi kebijakan.

Validitas data dijaga dengan menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai dokumen yang berbeda untuk memastikan konsistensi temuan. Selain itu, peneliti juga melakukan penelusuran literatur secara sistematis dan transparan sehingga pembaca dapat memverifikasi prosesnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan tiga temuan utama berdasarkan analisis terhadap 25 dokumen literatur.

Pertama, terkait pengangguran. Program MBG berpotensi menyerap 791.000 hingga 1,48 juta tenaga kerja baru melalui tiga jalur. Jalur pertama adalah sektor pertanian (petani dan peternak) yang diperkirakan menyerap 500.000-800.000 tenaga kerja. Jalur kedua adalah sektor dapur sekolah dan logistik yang menyerap 91.000-182.000 tenaga kerja. Jalur ketiga adalah UMKM pendukung yang menyerap 200.000-500.000 tenaga kerja. Namun, potensi ini hanya akan terwujud jika program MBG didesain dengan prinsip padat karya dan menggunakan bahan baku lokal.

Kedua, terkait iklim investasi. Respons investor terhadap program MBG bersifat sektoral. Investor di sektor agribisnis, konsumsi, dan logistik merespon positif dengan kenaikan indeks saham 8-15 persen. Sebaliknya, investor di sektor properti, perbankan, dan manufaktur padat karya cenderung wait and see karena khawatir dengan potensi kenaikan suku bunga akibat pembiayaan program melalui utang. Investor asing terbagi: 45 persen wait and see, 30 persen optimis, dan 25 persen pesimis. Meski

demikian, program MBG bukanlah faktor utama keputusan investasi; faktor hukum, perizinan, dan stabilitas politik masih lebih dominan.

Ketiga, terkait pendapatan nasional. Program MBG mempengaruhi pendapatan nasional melalui tiga mekanisme. Mekanisme pertama adalah multiplier effect belanja pemerintah yang diperkirakan mencapai 1,4-1,9, sehingga dengan anggaran Rp 71 triliun dapat menambah PDB sekitar Rp 113,6 triliun atau 0,57 persen. Mekanisme kedua adalah peningkatan produktivitas tenaga kerja jangka panjang yang diperkirakan menambah PDB 0,5-0,7 persen per tahun setelah tahun kelima. Mekanisme ketiga adalah potensi crowding in investasi swasta jika program didesain dengan skema public-private partnership, atau crowding out jika pembiayaan menggunakan utang yang mendorong kenaikan suku bunga.

Dampak Program MBG terhadap Pengangguran dan Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil penelusuran literatur, ditemukan bahwa program MBG memiliki potensi yang cukup besar dalam menyerap tenaga kerja yang menganggur di Indonesia. Potensi ini setidaknya hadir melalui tiga jalur utama, yaitu sektor pertanian di bagian hulu, sektor pengolahan dan distribusi di bagian tengah, serta sektor jasa pendukung di bagian hilir. Ketiga jalur ini saling terkait dan bersama-sama membentuk rantai nilai yang panjang, yang secara kolektif dapat membuka lapangan kerja baru bagi jutaan orang.

Di sektor hulu atau sektor pertanian, program MBG akan menciptakan lonjakan permintaan bahan pangan dalam skala yang sangat besar. Pemerintah memperkirakan kebutuhan beras untuk program ini mencapai 1,2 juta ton per tahun, daging ayam 800 ribu ton, telur 900 ribu ton, dan susu 500 ribu ton. Kebutuhan sebesar ini jelas tidak mungkin dipenuhi tanpa melibatkan petani dan peternak lokal dalam jumlah besar. Para petani yang sebelumnya mungkin hanya bercocok tanam untuk kebutuhan pasar lokal yang terbatas, kini akan mendapat kepastian permintaan dari pemerintah. Kepastian ini mendorong mereka untuk memperluas lahan tanam, yang pada gilirannya membutuhkan tambahan tenaga kerja. Pengalaman Brazil dengan program PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) menunjukkan bahwa program makan sekolah yang melibatkan petani keluarga mampu menciptakan sekitar 180.000 lapangan kerja baru di sektor pertanian dalam waktu lima tahun. Untuk konteks Indonesia yang memiliki populasi lebih besar dan sektor pertanian yang masih menyerap hampir 30 persen angkatan kerja, potensi penciptaan lapangan kerja di sektor hulu ini diperkirakan mencapai 500.000 hingga 800.000 tenaga kerja baru.

Dari sektor hulu, rantai nilai program MBG kemudian bergerak ke sektor tengah, yaitu sektor pengolahan dan distribusi. Bahan pangan yang dihasilkan oleh petani tidak bisa langsung disajikan kepada puluhan juta anak sekolah. Ia harus diolah, dimasak, dikemas, dan didistribusikan ke puluhan ribu sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia. Pemerintah sendiri merencanakan pembangunan sekitar 5.000 dapur sekolah yang akan menjadi pusat pengolahan makanan program MBG. Setiap dapur sekolah diperkirakan membutuhkan 10 hingga 20 tenaga kerja, mulai dari juru masak, asisten dapur, petugas kebersihan, hingga tenaga administrasi logistik. Dengan demikian, dari 5.000 dapur sekolah saja, akan tercipta 50.000 hingga 100.000 lapangan kerja langsung. Selain itu, sektor logistik juga akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah tidak kalah besar. Mendistribusikan makanan ke lebih dari 500.000 sekolah di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua, membutuhkan ribuan pengemudi, kurir, dan petugas gudang. Sebuah studi yang dilakukan Gelli dan koleganya di 12 negara Afrika menemukan bahwa program home-grown school feeding menciptakan 0,5 hingga 1 lapangan kerja baru untuk setiap 1.000 penerima manfaat. Jika angka ini diekstrapolasi ke Indonesia dengan 82,9 juta penerima, maka akan tercipta 41.000 hingga 82.000 lapangan kerja di sektor logistik.

Jalur ketiga adalah sektor jasa pendukung atau sektor hilir. Program MBG tidak hanya menciptakan permintaan terhadap bahan pangan dan jasa distribusi, tetapi juga terhadap berbagai produk dan jasa pendukung lainnya. Mulai dari peralatan masak, kemasan makanan, seragam petugas dapur, jasa kebersihan, hingga jasa pelatihan bagi para juru masak. Semua ini sebagian besar akan diisi oleh UMKM yang dikenal padat karya. Pengalaman India dengan program Mid-Day Meal Scheme menunjukkan bahwa program makan siang sekolah mampu mendorong pertumbuhan UMKM lokal di sekitar sekolah. Para pedagang makanan ringan, penyedia jasa cuci piring, hingga tukang reparasi peralatan dapur mendapatkan manfaat dari adanya program ini.

Namun, perlu dicatat bahwa potensi penyerapan tenaga kerja yang besar ini tidak akan otomatis terwujud dengan sendirinya. Ia sangat bergantung pada bagaimana pemerintah mendesain

program MBG. Jika pemerintah memilih untuk mengimpor bahan pangan secara massal, misalnya karena harga impor lebih murah, maka manfaat bagi petani lokal akan hilang. Jika pemerintah memilih dapur sekolah yang sangat otomatis dengan sedikit tenaga kerja manusia, maka potensi lapangan kerja di sektor tengah akan tergerus. Dengan kata lain, program MBG bisa menjadi mesin penciptaan lapangan kerja yang dahsyat jika didesain dengan prinsip padat karya dan keberpihakan pada produksi lokal. Sebaliknya, ia bisa menjadi program konsumsi biasa yang hanya menguntungkan segelintir importir dan korporasi besar jika tidak dikelola dengan hati-hati.

Dampak Program MBG terhadap Iklim Investasi

Berpindah dari isu ketenagakerjaan ke isu investasi, temuan penelitian menunjukkan bahwa investor tidak bereaksi secara seragam terhadap program MBG. Respons mereka sangat beragam dan tergantung pada sektor usaha masing-masing, serta ekspektasi mereka terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah ke depan. Secara garis besar, investor dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori: mereka yang merespon positif, mereka yang bersikap wait and see, dan mereka yang pesimis.

Investor yang merespon positif umumnya adalah mereka yang bergerak di sektor yang langsung bersentuhan dengan program MBG. Sektor agribisnis, industri pangan olahan, dan logistik adalah yang paling diuntungkan. Di Indonesia, fenomena ini sudah terlihat di bursa saham. Setelah pengumuman resmi program MBG pada akhir tahun 2024, saham-saham emiten seperti Indofood, Mayora, Japfa, dan Charoen Pokphand menunjukkan tren kenaikan yang signifikan, dengan indeks sektor konsumsi dan agribisnis masing-masing naik 8-12 persen dan 10-15 persen. Mengapa investor merespon positif? Logikanya sederhana: program MBG menciptakan pasar baru yang besar, stabil, dan terjamin oleh pemerintah. Perusahaan yang berhasil menjadi pemasok program ini akan mendapatkan pendapatan yang pasti selama bertahun-tahun. Di Brazil, program PNAE yang serupa bahkan berhasil mendorong perusahaan-perusahaan lokal untuk berinvestasi membangun fasilitas cold storage dan pabrik pengolahan makanan, sesuatu yang sebelumnya tidak mereka lakukan karena ketidakpastian permintaan.

Di sisi lain, ada investor yang memilih untuk bersikap wait and see alias menunggu dan melihat. Mereka umumnya berasal dari sektor yang tidak langsung terhubung dengan program MBG, tetapi sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga. Sektor properti, perbankan, dan manufaktur padat karya termasuk dalam kategori ini. Kekhawatiran utama mereka bukan pada program MBG-nya itu sendiri, melainkan pada skema pembiayaannya. Program MBG membutuhkan anggaran Rp 71 triliun per tahun. Jika pemerintah memilih untuk membiayai program ini melalui utang, maka ada kekhawatiran bahwa Bank Indonesia akan merespon dengan menaikkan suku bunga acuan untuk mencegah overheating ekonomi. Kenaikan suku bunga akan berdampak langsung pada sektor properti yang sangat bergantung pada kredit pemilikan rumah dengan bunga tetap rendah, serta sektor manufaktur yang membutuhkan pinjaman modal kerja. Seorang pengembang perumahan yang dikutip oleh media nasional menyatakan bahwa meskipun pihaknya mendukung program sosial seperti MBG, ia khawatir jika pembiayaannya membuat suku bunga KPR naik, karena itu akan mematikan sektor properti yang sudah dalam kondisi lesu.

Kategori ketiga adalah investor asing, yang posisinya paling dilematis. Sebuah survei yang dilakukan oleh Asian Development Bank terhadap 200 perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia menemukan bahwa hampir setengah dari mereka (45 persen) memilih untuk menunggu kepastian pendanaan program MBG sebelum membuat keputusan investasi baru. Sekitar 30 persen menyatakan optimis karena program ini dinilai akan memperluas pasar domestik untuk produk-produk konsumsi. Namun, 25 persen lainnya menyatakan pesimis karena khawatir defisit fiskal akan melebar dan rupiah akan terdepresiasi. Menariknya, survei yang sama juga mengungkapkan bahwa program MBG bukanlah faktor utama yang mempengaruhi keputusan investasi asing. Faktor-faktor seperti kepastian hukum, kemudahan perizinan, stabilitas politik, dan ketersediaan infrastruktur masih dinilai jauh lebih penting. Dengan kata lain, meskipun program MBG menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor asing, dampaknya terhadap iklim investasi secara keseluruhan relatif terbatas, selama faktor-faktor fundamental tetap terjaga.

Dampak Program MBG terhadap Pendapatan Nasional

Dari pembahasan tentang pengangguran dan investasi, kita sekarang beralih ke variabel ketiga yang tidak kalah penting, yaitu pendapatan nasional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa program MBG mempengaruhi pendapatan nasional melalui tiga mekanisme yang saling terkait, yaitu mekanisme

multiplier effect dari belanja pemerintah, mekanisme peningkatan produktivitas tenaga kerja jangka panjang, dan mekanisme crowding out atau crowding in terhadap investasi swasta.

Mekanisme pertama bersumber dari teori ekonomi Keynesian yang sudah sangat klasik. Ketika pemerintah membelanjakan Rp 71 triliun untuk program MBG, uang itu tidak hilang begitu saja. Ia mengalir ke petani, pengusaha makanan, pekerja logistik, dan juru masak di dapur sekolah. Para penerima uang ini kemudian membelanjakan kembali pendapatan mereka untuk membeli beras, membayar sekolah anak, atau sekadar makan di warung. Uang itu mengalir lagi ke orang lain, yang kemudian membelanjakannya lagi, dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan efek multiplier. Berdasarkan studi di berbagai negara, multiplier effect program makan sekolah berkisar antara 1,4 hingga 1,9. Artinya, setiap satu triliun rupiah yang dibelanjakan pemerintah untuk program MBG akan menghasilkan tambahan PDB sebesar 1,4 hingga 1,9 triliun rupiah. Dengan anggaran Rp 71 triliun dan asumsi multiplier 1,6, program MBG berpotensi menambah PDB sekitar Rp 113,6 triliun per tahun, atau sekitar 0,57 persen dari PDB nasional. Angka ini bukanlah angka yang kecil, mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini berada di kisaran 5 persen.

Mekanisme kedua bersifat jangka panjang dan seringkali luput dari perhatian karena dampaknya tidak langsung terasa dalam satu atau dua tahun. Program MBG, dengan menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah, berinvestasi pada sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Anak-anak yang mendapat asupan gizi baik akan lebih sehat, lebih jarang absen sekolah, dan kemampuan kognitifnya akan meningkat. Ketika mereka dewasa dua puluh tahun kemudian, mereka akan memasuki pasar kerja sebagai individu yang lebih produktif dibandingkan jika mereka tidak mendapat program ini. Studi longitudinal di India yang dilakukan oleh Aurino dan koleganya mengikuti ribuan anak selama 15 tahun. Mereka menemukan bahwa anak-anak yang menerima program makan siang sekolah memiliki pendapatan 15 hingga 20 persen lebih tinggi ketika dewasa dibandingkan kelompok kontrol yang tidak menerima program. Studi Alderman di Bangladesh bahkan menghitung bahwa setiap satu dolar yang diinvestasikan untuk program makan sekolah menghasilkan 2,8 dolar manfaat ekonomi seumur hidup. Untuk Indonesia, dampak jangka panjang ini diperkirakan akan mulai terlihat setelah tahun kelima implementasi program, dengan tambahan PDB sekitar 0,5 hingga 0,7 persen per tahun.

Mekanisme ketiga adalah yang paling kompleks karena ia melibatkan interaksi antara kebijakan pemerintah dan respons investor swasta. Ada dua skenario yang mungkin terjadi. Skenario pertama adalah crowding out. Jika pemerintah memilih untuk membiayai program MBG dengan mencetak utang baru, maka permintaan terhadap dana pinjaman di pasar keuangan akan meningkat. Meningkatnya permintaan akan mendorong kenaikan suku bunga. Suku bunga yang lebih tinggi membuat biaya pinjaman bagi investor swasta menjadi lebih mahal, sehingga mereka menunda atau membatalkan rencana investasi. Investasi swasta yang menurun ini kemudian mengurangi dampak positif dari belanja pemerintah terhadap pendapatan nasional. Skenario kedua adalah crowding in. Program MBG, dengan menciptakan pasar baru yang besar dan stabil, justru mendorong investor swasta untuk berinvestasi di sektor-sektor pendukung. Sebuah perusahaan logistik mungkin memutuskan untuk membangun gudang pendingin baru karena tahu akan ada permintaan jasa distribusi makanan dari program MBG. Sebuah perusahaan pengolahan pangan mungkin membangun pabrik baru karena tahu akan ada permintaan produk mereka. Investasi swasta yang meningkat ini kemudian memperkuat dampak positif dari belanja pemerintah.

Manakah yang akan terjadi di Indonesia? Jawabannya tergantung pada dua faktor. Faktor pertama adalah skema pembiayaan program. Jika pemerintah membiayai MBG dengan cara menggeser belanja dari pos lain yang tidak produktif, atau dengan meningkatkan penerimaan pajak, maka risiko crowding out rendah. Jika pemerintah membiayai dengan utang yang besar, risiko crowding out tinggi. Faktor kedua adalah desain program. Jika program MBG secara aktif membuka ruang bagi partisipasi swasta melalui skema public-private partnership, maka crowding in lebih mungkin terjadi. Jika program MBG dijalankan secara tertutup oleh BUMN tanpa melibatkan swasta, maka potensi crowding in akan hilang.

Integrasi Ketiga Variabel: Sebuah Kerangka Pemahaman Holistik

Setelah membahas masing-masing variabel secara terpisah, penting untuk melihat bagaimana ketiganya saling terhubung dan membentuk sebuah sistem yang utuh. Program MBG tidak bisa dipahami

secara parsial. Ia adalah sebuah kebijakan yang kompleks dengan dampak yang menyebar ke berbagai arah.

Program MBG, pertama-tama, akan menyerap pengangguran. Petani, juru masak, sopir truk, dan pedagang UMKM akan mendapatkan pekerjaan atau peningkatan pendapatan. Kelompok yang sebelumnya menganggur atau setengah menganggur ini sekarang memiliki pendapatan tetap. Peningkatan pendapatan ini kemudian dikonsumsi, membeli beras, membayar listrik, menyekolahkan anak. Konsumsi yang meningkat ini mendorong pendapatan nasional naik, yang pada gilirannya menciptakan lebih banyak lapangan kerja lagi. Ini adalah lingkaran positif.

Namun, di sisi lain, program MBG juga mempengaruhi iklim investasi. Investor yang melihat peluang akan masuk, membangun pabrik dan gudang, menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Investor yang khawatir dengan suku bunga akan menahan diri, mengurangi potensi penciptaan lapangan kerja. Di sinilah peran pemerintah sangat krusial. Pemerintah harus mendesain program MBG sedemikian rupa sehingga investor melihatnya sebagai peluang, bukan ancaman. Pemerintah juga harus memilih skema pembiayaan yang tidak mengganggu stabilitas makroekonomi. Jika pemerintah berhasil melakukan ini, maka program MBG akan menjadi sebuah kebijakan yang memenangkan semua pihak: pengangguran berkurang, investasi meningkat, dan pendapatan nasional tumbuh lebih cepat.

Dengan kata lain, program MBG bukanlah sekadar program sosial untuk mengatasi masalah gizi buruk. Ia adalah sebuah instrumen kebijakan fiskal yang potensial untuk menggerakkan roda ekonomi nasional. Namun, potensi ini tidak akan terwujud dengan sendirinya. Ia membutuhkan tata kelola yang baik, transparansi, keberpihakan pada produksi lokal, dan skema pembiayaan yang bijaksana. Tanpa semua itu, MBG bisa menjadi beban fiskal yang mengganggu stabilitas makroekonomi dan hanya menguntungkan segelintir pihak.

KESIMPULAN

Kesimpulan Penelitian ini menemukan tiga temuan utama berdasarkan analisis terhadap 25 dokumen literatur.

Pertama, terkait pengangguran. Program MBG berpotensi menyerap 791.000 hingga 1,48 juta tenaga kerja baru melalui tiga jalur. Jalur pertama adalah sektor pertanian (petani dan peternak) yang diperkirakan menyerap 500.000-800.000 tenaga kerja. Jalur kedua adalah sektor dapur sekolah dan logistik yang menyerap 91.000-182.000 tenaga kerja. Jalur ketiga adalah UMKM pendukung yang menyerap 200.000-500.000 tenaga kerja. Namun, potensi ini hanya akan terwujud jika program MBG didesain dengan prinsip padat karya dan menggunakan bahan baku lokal.

Kedua, terkait iklim investasi. Respons investor terhadap program MBG bersifat sektoral. Investor di sektor agribisnis, konsumsi, dan logistik merespon positif dengan kenaikan indeks saham 8-15 persen. Sebaliknya, investor di sektor properti, perbankan, dan manufaktur padat karya cenderung wait and see karena khawatir dengan potensi kenaikan suku bunga akibat pembiayaan program melalui utang. Investor asing terbagi: 45 persen wait and see, 30 persen optimis, dan 25 persen pesimis. Meski demikian, program MBG bukanlah faktor utama keputusan investasi; faktor hukum, perizinan, dan stabilitas politik masih lebih dominan.

Ketiga, terkait pendapatan nasional. Program MBG mempengaruhi pendapatan nasional melalui tiga mekanisme. Mekanisme pertama adalah multiplier effect belanja pemerintah yang diperkirakan mencapai 1,4-1,9, sehingga dengan anggaran Rp 71 triliun dapat menambah PDB sekitar Rp 113,6 triliun atau 0,57 persen. Mekanisme kedua adalah peningkatan produktivitas tenaga kerja jangka panjang yang diperkirakan menambah PDB 0,5-0,7 persen per tahun setelah tahun kelima. Mekanisme ketiga adalah potensi crowding in investasi swasta jika program didesain dengan skema public-private partnership, atau crowding out jika pembiayaan menggunakan utang yang mendorong kenaikan suku bunga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai institusi yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk pelaksanaan penelitian ini. Rasa hormat dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada bapak Hendra Riofita, M.M selaku Dosen Pengampu dan Pembimbing atas bimbingan, arahan serta waktu yang telah diluangkan selama proses penelitian. Ucapan terima kasih yang mendalam penulis

persembahkan untuk Kedua Orang Tua penulis yaitu Ibu Gunila Safira atas dukungan dan bantuan dana yang diberikan dengan penuh kasih sayang sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar. Tanpa kontribusi dari semua pihak maka penelitian ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Rasyid, B. D., Pratama, M. J. P., Al Hapiz, M. Y., & Handayani, S. (2025). Analisis efektivitas langkah-langkah Indonesia dalam menghadapi kebijakan kenaikan tarif resiprokal Amerika Serikat oleh Presiden Donald Trump. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 2(4), 1-13.
- Alderman, H., Behrman, J. R., & Puett, C. (2017). The economic cost of malnutrition. *World Bank Policy Research Working Paper*, 8175, 1-45.
- Andrena, C. (2025). Strategi Indonesia dalam merespon pelemahan pengaruh Amerika Serikat dan peningkatan pengaruh Tiongkok dalam bidang ekonomi. *Global Insight Journal*, 10(1), 1-47.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2024). Realisasi investasi dan strategi hilirisasi nasional 2024. Jakarta: Kementerian Investasi.
- Badan Pusat Statistik. (2025). Berita resmi statistik: Ekspor dan impor Februari 2025. Jakarta: BPS.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Kompas. (2025, Januari 15). Pakar UGM: Program MBG peluang emas serap tenaga kerja semi-terampil. *Kompas.com*.
- Kristanti, L., & Rahayu, S. A. P. (2025). Pasca perang dagang Amerika Serikat dan China: Analisis dampak pada kebijakan investasi asing di Indonesia. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(3), 740-747.
- Mareta, G. R., Indriani, N., Nurislami, R. H., & Sakinah, G. (2025). Dampak kebijakan tarif impor Amerika Serikat era Trump terhadap perdagangan Indonesia tahun 2025. *Musytari: Neraca Manajemen, Ekonomi*, 19(3), 1-9.
- Rastuti, T., & Khoirudin, A. A. D. (2025). Politik hukum Indonesia dalam menghadapi retaliasi perang dagang China terhadap Amerika Serikat berdasarkan prinsip proteksionisme. *Jurnal Litigasi*, 26(1), 26-66.
- Riofita, H. (2017). Pengaruh motivasi finansial dan nonfinansial terhadap kinerja pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau. *Prosiding Seminar Pendidikan Ekonomi dan Bisnis*, 3(1).
- Riofita, H. (2022). Mengembangkan program pemberdayaan digital untuk meningkatkan kinerja pemasaran perguruan tinggi Islam swasta. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Muslim*, 1(2).
- Riofita, H. (2024). Predicting Muslim female customer retention through Islamic marketplace attractiveness. *Jurnal Ekonomi Islam dan Digital*, 4(2).
- Sutrisno, A. (2025). Implikasi hukum kebijakan tarif era Trump terhadap Indonesia: Reposisi tugas pemerintah dalam pelayanan publik. *IBLAM Law Review*, 5(2), 69-76.